

**RESPON G7 TERHADAP KEHADIRAN TIONGKOK
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh:

NADYA KIRANTI ANNISA AMALIA

E061191007

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL
SKRIPSI
RESPON G7 TERHADAP KEHADIRAN TIONGKOK DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh :

NADYA KIRANTI ANNISA AMALIA

E061191007

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemenn Ilmu

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : RESPON G7 TERHADAP KEHADIRAN TIONGKOK DI INDONESIA

NAMA : NADYA KIRANTI ANNISA AMALIA

NIM : E061191007

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 26 Januari 2024



Pembimbing I,

Dr. H. Adi Suryadi B, MA.
NIP. 196302171992021001

Pembimbing II,

Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIK.. 198909132020053001

Mengesahkan :

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,

Aswin Baharuddin, S.IP, MA.
NIP. 198607032014041002

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : RESPON G7 TERHADAP KEHADIRAN TIONGKOK DI INDONESIA

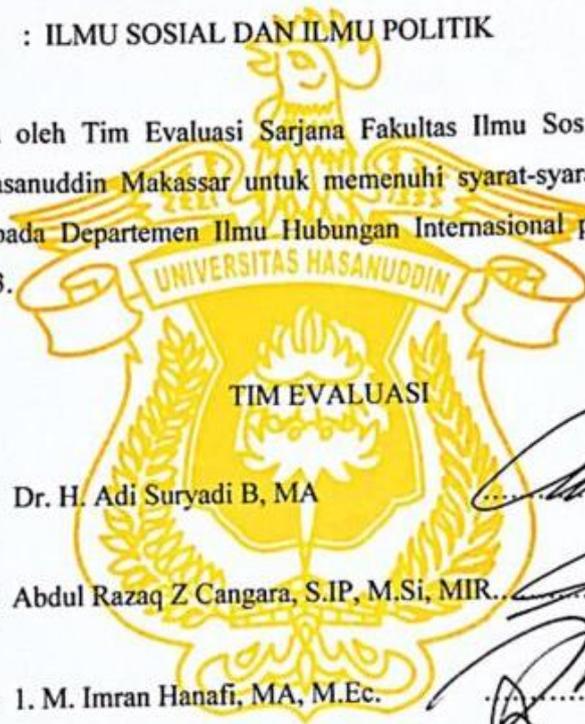
NAMA : NADYA KIRANTI ANNISA AMALIA

NIM : E061191007

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 15 Desember 2023.



Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B, MA

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.

Anggota : 1. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadya Kiranti Annisa Amalia

NIM : E061191007

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

“RESPON G7 TERHADAP KEHADIRAN TIONGKOK DI INDONESIA”

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Januari 2024

Yang menyatakan,



Nadya Kiranti Annisa Amalia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan anugerah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Respon G7 Terhadap Kehadiran Tiongkok di Indonesia**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW atas sunnah dan petunjuknya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin. Proses dari penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, baik itu pengumpulan literatur hingga sampai ke tahap menganalisis dan pengolahan data. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan:

1. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya. Bapak Dr. Phill Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin beserta seluruh staffnya. Terima kasih kepada Prof. H. Darwis, MA., Ph.D selaku Kepala Departemen dan Aswin Baharuddin., S.IP., MA selaku Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program Sarjana.
2. Dengan tulus penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. H. Adi Suryadi B, MA sebagai Pembimbing Utama dan Abdul Razaq Z. Cangara.,

S.IP., M.Si., MIR selaku Pembimbing Kedua sebagai dua pengajar yang memiliki peran yang signifikan dengan memberikan dorongan, bantuan, serta mengarahkan penulis selama masa penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kepada kebaikan yang telah Bapak-Bapak berikan kepada penulis.

3. Ucapan terima kasih kepada tim penguji Drs. H. Imran Hanafi, MA, M.Ec, Drs. Munjin Syafik Asyari., M.Si, dan Ishaq Rahman, S.IP., M.Si. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran yang sangat bermanfaat atas penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan serta kesehatan kepada Bapak-Bapak beserta keluarga.
4. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin yang sangat berjasa atas ilmu yang telah diajarkan, pengaruh positif yang diberikan, dan lingkungan belajar yang sangat baik. Serta ucapan terima kasih kepada staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai urusan selama studi. Permintaan maaf yang mendalam atas kesalahan penulis selama masa studi.
5. Kepada ketiga sahabat penulis selama masa perkuliahan yaitu, Bunga Apriliani, Izmayuni, dan Muhammad Khaerul Amri, yang selalu ada baik itu dalam keadaan susah maupun senang, yang selalu memberikan bantuan kepada penulis. Dengan ini penulis secara tulus mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka dalam masa studi penulis. Semoga persahabatan ini dapat terus berlanjut, doa yang terbaik untuk kalian bertiga.

6. Ucapan khusus kepada Deborah Theresa Mona yang telah penulis anggap sebagai sahabat, tempat bercerita baik itu saat sedih, senang, maupun kosong, teman selama magang, dan selama KKN. Terima kasih untuk tetap bertahan di masa perkuliahan dan telah bersedia untuk menjadi sahabat bagi penulis. Penulis hanya berharap semoga semua doa dan impianmu dapat tercapai. Jangan bosan-bosan di pertemanan ini dan *see u* di keadaan selanjutnya!!!
7. Kepada teman masa perkuliahan, Samantha, Maya, Fira, Dinna, Kezia, Reysita, Nia, dan Indra terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan warna, bantuan, dan semangat selama masa perkuliahan. Semoga kalian selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Lalu, ucapan terima kasih kepada teman-teman penulis lainnya Wiwit, Olaf, Nanda, Salsa, Nadhrah, Riswan, Farhan, Ferhard, Sain, Yusril, Syefa, Alif, Yudis, dan teman-teman HI 19 lainnya yang tidak bisa disebutkan. Terima kasih atas semuanya, *see u on top guys*.
8. *My favorite humans* Maudy Amalyah Dodhy Putri, Regita Ayu Magfirah, dan Muhammad Giffaryansyah, yang selalu ada dan mendukung penulis dalam keadaan apapun. Dengan tulus penulis mengucapkan rasa terima kasih atas semuanya. Penulis akan terus mendukung dan mendoakan semoga semua mimpi yang kalian harapkan dapat tercapai. *Love u guys!!*
9. Kepada ketiga teman penulis yang sesama anak rantau Ais, Nindya, dan Kale, terima kasih atas semuanya. Semoga kita bisa pulang dengan

membawa gelar yang kita dapatkan. Teman-teman SMA penulis PERKUM dan ABS terima kasih atas *support* yang diberikan.

10. Penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak penulis Devita Giscka Rezqi Aulia., S.E., M.Si. dan adik penulis Deandra Audy Aisiyah Islamy, yang tulus memberikan motivasi, semangat, dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terima kasih atas transferannya selama ini.

11. Terakhir, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan dan kebaikan kedua orang tua penulis Ayahanda Dr. Ir. H. Pahri Yamsul., M.Si. dan Ibunda Hj. Rosmaladewi Maiseng., S.Ag. yang mendidik, membesarkan, dan mendoakan penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sampai pada tahap kesempurnaan sehingga permohonan maaf penulis sampaikan apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Penulis berharap dengan melalui skripsi ini dapat membantu peneliti selanjutnya ataupun berkontribusi dalam dunia pendidikan.

Makassar, 26 Januari 2024

Nadya Kiranti Annisa Amalia

ABSTRAK

Nadya Kiranti Annisa Amalia (E061191007), dengan judul Respon G7 Terhadap Kehadiran Tiongkok di Indonesia. Pembimbing I: Dr. H. Adi Suryadi B, MA. Pembimbing II: Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa respon yang diberikan oleh negara-negara G7 terhadap kehadiran Tiongkok di Indonesia. Kehadiran Tiongkok yang terus mengalami peningkatan terutama pada sektor ekonomi membuat negara-negara G7 terutama Amerika Serikat yang telah lama menjadi mitra utama pada sektor ekonomi di Indonesia mengalami terancam, sehingga G7 berupaya untuk mempertahankan posisinya dengan menjalankan program *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII). Tiongkok terus menjalankan kebijakan ekonominya dengan melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia yang sedang mendorong pembangunan nasionalnya terutama proyek-proyek strategis yang berada dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Adapun data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, skripsi, buku, berita, dan situs-situs resmi, yang kemudian dianalisis dengan metode penulisan deduktif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebijakan ekonomi luar negeri dengan berfokus pada bantuan ekonomi luar negeri.

Hasil dari penelitian ini yaitu akan berfokus pada kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh negara G7 bersama pemerintah Indonesia dibawah naungan program PGII sebagai bentuk dari respon G7 atas kehadiran Tiongkok di sektor ekonomi Indonesia. Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi yaitu program PGII yang memiliki keunggulan di pembangunan hijau memberikan alternatif lain pada pemerintah Indonesia yang sedang berusaha untuk mencapai target emisi nol karbon pada tahun 2030. Sehingga kerjasama yang dijalankan memberikan peluang yang besar terhadap keberhasilan dari program PGII pada sektor energi baru terbarukan di Indonesia. Sedangkan tantangan yang dihadapi yaitu persyaratan dan pembiayaan yang ditawarkan oleh Tiongkok kepada pemerintah Indonesia dianggap lebih menarik dan mudah sehingga negara G7 masih harus berupaya untuk meyakinkan pemerintah Indonesia terhadap tawaran yang diberikan.

Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi Luar Negeri, Bantuan Luar Negeri, *Group of Seven*, Tiongkok, Indonesia

ABSTRACT

Nadya Kiranti Annisa Amalia (E061191007), with the title Response of the G7 to the presence of China in Indonesia. Advisor I: Dr. H. Adi Suryadi B, MA. Advisor II: Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR.

This research aims to analyze the response given by the G7 countries to China's presence in Indonesia. China's increasing presence, especially in the economic sector, has threatened the G7 countries, especially the United States, which has long been the main partner in the economic sector in Indonesia, so the G7 seeks to maintain its position by running the Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) program. China continues to carry out its economic policies through the Belt and Road Initiative (BRI) project by providing foreign aid to Indonesia, which is promoting its national development, especially strategic projects under the leadership of President Joko Widodo (Jokowi).

In this research, the author uses qualitative methods with data collection techniques in the form of literature studies. The data used is secondary data obtained through journals, theses, books, news, and official websites, which are then analyzed using the deductive writing method. The concept used in this research is foreign economic policy by focusing on foreign economic assistance.

The results of this research will focus on the cooperation carried out by the G7 countries with the Indonesian government under the auspices of the PGII program as a form of G7 response to China's presence in the Indonesian economic sector. The opportunities and challenges faced are that the PGII program, which has an advantage in green development, provides another alternative to the Indonesian government which is trying to achieve zero carbon emission targets by 2030. So that the cooperation carried out provides a great opportunity for the success of the PGII program in the new renewable energy sector in Indonesia. While the challenges faced are the terms and financing offered by China to the Indonesian government are considered more attractive and easy so that the G7 countries still have to try to convince the Indonesian government of the offer given.

Keywords: Foreign Economic Policy, Foreign Aid, Group of Seven, China, Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.4 Kerangka Konseptual	12
1.4.1 Kebijakan Ekonomi Luar Negeri	12
1.4.2 Model Analisis	19
1.4.3 Argumentasi Penelitian	20
1.5 Penelitian Terdahulu	21
1.6 Metode Penelitian	26
1.6.1 Tipe Penelitian	26
1.6.2 Jenis Data	26
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	27
1.6.4 Teknik Analisis Data	27
1.7 Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Kebijakan Ekonomi Luar Negeri	30
2.1.1 Bantuan Luar Negeri	37
2.2 Penelitian Terdahulu	47
BAB III GAMBARAN UMUM	54

3.1	Perkembangan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia.....	55
3.2	Hubungan Ekonomi Tiongkok dan Indonesia.....	61
3.2.1	Kerjasama Ekonomi Tiongkok dan Indonesia Pada Proyek <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI).....	68
3.3	Hubungan Negara-Negara G7 dan Indonesia	81
3.3.1	Program <i>Partnership for Global Infrastructure and Investment</i> (PGII) 88	
BAB IV PEMBAHASAN.....		93
4.1	Respon Negara G7 Terhadap Kehadiran Tiongkok di Indonesia	94
4.2	Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Oleh G7 Dalam Merespon Kehadiran Tiongkok	105
BAB V PENUTUP.....		115
5.1	Kesimpulan.....	115
5.2	Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA		119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Investasi Asing Negara-Negara G7 di Indonesia Tahun 2019 s.d. 2023	7
Gambar 1.2 Realisasi Investasi Tiongkok di Indonesia Tahun 2019 s.d. 2023	8
Gambar 1.3 Bagan Kerangka Konseptual	19
Gambar 3.1 Realisasi Investasi Tiongkok di Indonesia Tahun 2010 s.d. 2023	64
Gambar 3.2 Peta <i>Belt and Road Initiative</i> Tiongkok	68
Gambar 3.3 Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung	73
Gambar 3.4 Realisasi Investasi Asing di Indonesia Tahun 1990 s.d. 2023	83
Gambar 3.5 Realisasi Investasi AS di Indonesia Tahun 2010 s.d. 2023.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Proyek Infrastruktur Indonesia yang Dibiayai Oleh Tiongkok.....	65
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geopolitik dunia yang mengalami transformasi dari sistem bipolar menjadi multipolar mendorong Asia untuk bangkit dan menciptakan sebuah perubahan kekuasaan baru yang sebelumnya mengarah ke Barat menjadi ke Timur. Salah satu negara yang menunjukkan peningkatan yang sangat cepat yaitu Tiongkok (Gu, et al., 2008). Kebangkitan Tiongkok menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari, beberapa tahun kebelakang Tiongkok seakan-akan memberikan pertanda akan kebangkitan yang dilihat oleh banyak negara. Cepatnya perkembangan yang dialami oleh Tiongkok menjadi sebuah tantangan bagi keseimbangan tatanan dunia global terkhusus bagi kelompok negara-negara maju yakni *Group of Seven (G7)* (Gu, Humphrey and Messner, 2008).

G7 merupakan kelompok dari negara-negara maju yang mampu untuk mendominasi perekonomian internasional. Hal ini dikarenakan G7 dianggap mampu menguasai lembaga-lembaga ekonomi internasional dan mendorong negara berkembang untuk bergabung dalam lembaga tersebut dengan menjanjikan akan membantu permasalahan ekonomi di negara berkembang (Iswara, 2021). G7 terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jepang, Jerman, Perancis, Kerajaan Inggris, serta Uni Eropa yang diwakili oleh Presiden Komisi Eropa dan Ketua Parlemen Eropa yang merupakan symbol

dari kedigdayaan ekonomi dunia baik itu dari segi ekspor-impor, pendapatan per kapita, volume perdagangan, dan parameter ekonomi lainnya. G7 juga menjadi symbol bagi bentuk pemerintah yang stabil, demokratis, dan sangat mengutamakan perdamaian (Lieberman and Padilla, 2023).

Besarnya peran yang dipegang oleh ketujuh negara ini membuat setiap keputusan yang diambil baik itu pada sektor ekonomi maupun politik memberikan pengaruh terhadap tatanan dunia internasional. Salah satu negara yang paling mendominasi pada G7 yaitu Amerika Serikat atau biasa dikenal dengan AS. AS merupakan negara yang memiliki pengaruh kuat dalam berbagai aspek baik itu secara ekonomi, politik, keamanan global dll. Dominasi yang dipegang oleh AS tidak luput dari kemenangannya ketika melawan Uni Soviet. AS yang dianggap telah menjadi pengaruh bagi dunia internasional, dan banyak negara-negara yang menjadikan AS sebagai kiblat, mulai dari industri, mata uang, budaya, hingga teknologi. Tentunya dengan posisi yang dimiliki membuat AS aktif memiliki peran yang aktif dalam mengatur tatanan regional di beberapa kawasan, maka dari itu AS seringkali dianggap menjadi wasit ataupun penengah dalam suatu konflik yang terjadi antar negara (Aqmarina & Puspitasari, 2021).

Selain AS terdapat negara-negara besar lainnya yang memiliki perekonomian yang tinggi di G7 yakni Jepang. Perekonomian yang dimiliki oleh mayoritas negara G7 masuk kedalam kategori negara maju dan menjadi perekonomian tertinggi di dunia. G7 secara otomatis memiliki peran yang penting terutama untuk organisasi internasional yang bergerak pada sektor

perdagangan dan ekonomi. Perekonomian G7 yang sukses dibantu oleh daya beli yang tinggi sehingga dengan adanya hal tersebut membuat perekonomian negara-negara G7 mengalami kemajuan yang pesat (Putra, 2017). Namun saat ini, kebangkitan Tiongkok yang mengubah sistem dunia membuat G7 tidak lagi berdiri sendiri di puncak tatanan dunia.

Seiring berjalannya waktu, Tiongkok semakin menjadi negara yang memberikan pengaruh dan konektivitas besar sehingga menarik perhatian dunia internasional. Perkembangan yang dialami oleh Tiongkok tidak hanya pada kekuatan ekonomi yang semakin kuat, namun juga Tiongkok menjadi negara yang memiliki kuasa yang luas dengan melalui pengaruh serta konektivitas di dunia khususnya pada Asia (Bergsten, 2005). Kebangkitan Tiongkok diawali sejak Deng Xiaoping memimpin negara tersebut pada tahun 1976-1989, ia berasal dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan perlahan menunjukkan kemajuan yang cukup pesat untuk negara ‘tirai bambu’ tersebut (Satriakhan and Prasetyono, 2022). Deng Xiaoping membuat perubahan baru terhadap sistem perekonomian Tiongkok yakni dengan lebih mengutamakan sistem liberalisasi perdagangan yang tetap mengarah ke sosialis atau dengan istilah kebijakan *Socialist Market Economy* (SME). Setelah melakukan perubahan tersebut, Deng Xiaoping dikenal sebagai Bapak Reformasi Ekonomi Tiongkok (Berger, Choi and Herstein, 2013). Adapun dampak dari reformasi yang dilakukan yaitu, perdagangan Tiongkok mengalami peningkatan 110 kali lipat yakni menjadi US\$596 miliar pada tahun 2000 yang sebelumnya pada tahun 1978 berada pada angka US\$5,39

miliar. Sehingga angka kemiskinan di Tiongkok mengalami penurunan dari 53% pada tahun 1981, menjadi 8% pada tahun 2009 (Deng, 2013).

Pada era persaingan teknologi dan ekonomi saat ini, salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara yaitu dengan melalui pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP). Pada tahun 2010, GDP yang dimiliki oleh Tiongkok tercatat senilai US\$5,88 triliun dan meningkat pada tahun 2013 yang membuat Tiongkok berada di urutan kedua dengan negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia setelah AS. Selain itu, Tiongkok membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dialaminya merupakan peningkatan yang tercepat di dunia bahkan rata-rata yang dicapai tiap tahunnya hampir 10%. Meskipun pada tahun 2021, pertumbuhan GDP Tiongkok melambat yakni sebesar 8,1%, akibat pemulihan pasca Covid-19. Namun hal tersebut masih membuat Tiongkok dianggap sebagai salah satu kekuatan baru, Tiongkok secara perlahan berupaya untuk mengambil alih peran penting pada sektor ekonomi di tingkat global (Huld, 2022).

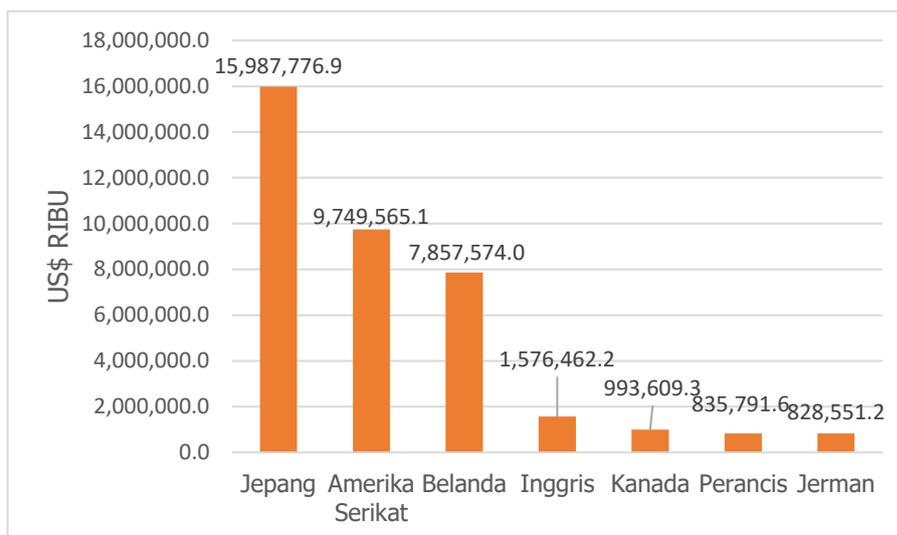
Saat ini kebangkitan yang dialami oleh Tiongkok yang didukung dengan kebijakan luar negerinya, dianggap sebagai upaya untuk menyaingi kekuatan yang dimiliki oleh major *power* dunia, terutama ketika Presiden Xi Jinping memimpin Tiongkok. Dengan kepemimpinan Presiden Xi, Tiongkok mengalami kebangkitan dengan menjadi negara yang semakin tak tertandingi pada kekuatan ekonomi dunia. Salah satu strategi yang dilancarkan oleh presiden Xi yaitu pada kebijakan pembangunan ekonomi terkemuka yakni *Belt and Road Initiative* atau dikenal sebagai BRI. Proyek BRI diperkenalkan

kepada publik pada 7 September 2013, sebagai upaya untuk merealisasikan konektivitas wilayah Eurasia, meliputi Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, hingga Eropa (Korwa, 2019). Kesempatan dan kemungkinan mendapatkan untung yang sangat besar dengan kebijakan tersebut terutama pada segi diplomasi dan perekonomian, membuat banyak negara yang tertarik dengan ambisi yang dimiliki oleh Tiongkok demi perekonomian mereka. Sehingga, BRI dianggap menjadi sebuah potensi untuk membantu banyak negara didunia yang sedang menjalankan pembangunan mereka dan ingin memiliki interaksi yang baik bersama Tiongkok khususnya pada sektor ekonomi (Huang, 2016). Berkembangnya dominasi Tiongkok di kawasan Asia, salah satunya Indonesia merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari.

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, Tiongkok belum memiliki kekuatan sebagai raksasa ekonomi dan pada saat itu yang menjadi pemegang ekonomi terbesar di dunia yaitu AS, Jepang, Jerman, dan Inggris. Keempat negara tersebut memberikan kontribusi utama untuk pembangunan di Asia, termasuk di Indonesia (Mujiono, 2022). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menerima bantuan dari G7 dan Tiongkok membutuhkan dana dengan jumlah yang besar demi mencapai target pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa investasi menjadi hal yang penting dalam mengembangkan perekonomian. Maka dari itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaiki prosedur investasi yang dapat memajukan situasi investasi di Indonesia (Hemamona and Suharyono, 2017).

Pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemerintahan Indonesia membuka kesempatan untuk investasi asing yang sejalan dengan lima visi pada era Presiden Jokowi. Adapun lima visi tersebut yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur, membenahi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), membuka investasi asing seluas-luasnya agar dapat membantu memberikan lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, dan mengeluarkan APBN yang fokus dan tepat pada sasarannya. Dengan melalui visi tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk terus mengeluarkan kebijakan ataupun regulasi yang ditunjukkan untuk mereformasi kebijakan investasi yang ada dengan melalui bantuan dari investor asing (Fithra, 2021). Indonesia yang menjadi salah satu arena rivalitas antara G7 dan Tiongkok dikarenakan memiliki posisi wilayah yang strategis. Dalam persaingan tersebut, kedua negara berlomba-lomba untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Negara-negara G7 yang telah menjadi mitra yang memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia akhir-akhir ini terus berusaha menjalankan kepentingannya dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan, militer, diplomasi, dll. Pada bidang ekonomi, G7 membentuk sebuah program yaitu *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) yang dimana program tersebut diinisiasi oleh Presiden Joe Biden dengan mengajak pemimpin negara G7 lainnya untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan pembangunan nasionalnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dengan program milik G7 ini (U.S. Embassy Jakarta, 2021).



Gambar 1.1 Realisasi Investasi Asing Negara-Negara G7 di Indonesia Tahun 2019 s.d. 2023

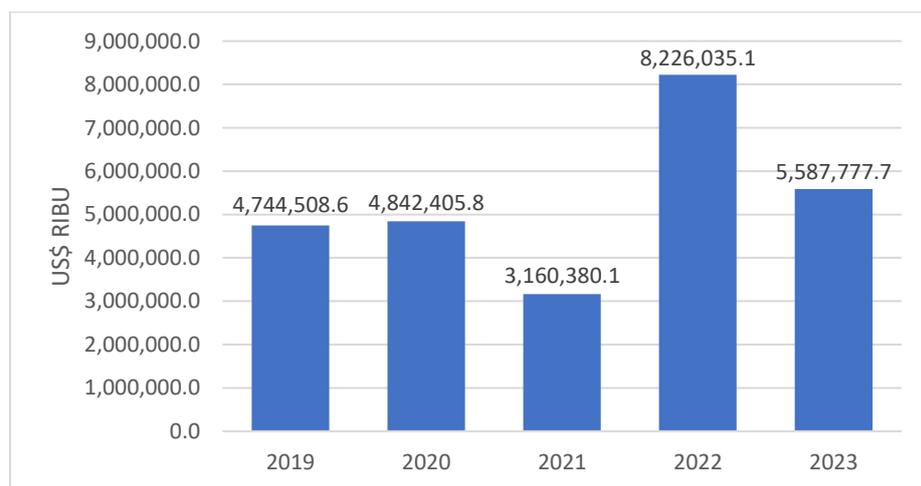
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Seperti yang dilihat pada gambar diatas, nilai investasi negara-negara G7 pada tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi G7 yang terbesar yakni berasal dari Jepang dengan nilai US\$15,9 miliar, lalu posisi kedua yaitu AS dengan nilai US\$9,74 miliar. Sementara itu, pada posisi ketiga yakni Belanda dengan total investasi US\$7,8 miliar, lalu Inggris US\$1,5 miliar, Kanada US\$993 juta, Perancis US\$835 juta, dan terakhir Jerman yakni US\$828 juta (Badan Pusat Statistik, 2023).

Negara-negara G7 telah lama menjadi mitra bagi Indonesia baik itu dalam sektor ekonomi ataupun yang lainnya. Sebelum kehadiran Tiongkok, negara G7 telah lebih dulu berkontribusi untuk membantu Indonesia dalam meraih kepentingan nasional dan memajukan pembangunan nasionalnya. Negara-negara tersebut memberikan bantuan salah satunya dalam bentuk investasi dengan melalui kerjasama-kerjasama baru, sehingga terjalin

hubungan yang baik antara pihak-pihak tersebut. Namun saat ini G7 bukan lagi menjadi satu-satunya mitra internasional yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satu negara yang dianggap dapat mengimbangi ketertinggalannya yaitu Tiongkok.

Tiongkok sendiri terus meningkatkan hubungannya dengan Indonesia. Hubungan antara kedua negara tersebut didorong oleh pembangunan infrastruktur milik Indonesia yang membutuhkan investasi besar dari Tiongkok, sehingga kedua negara banyak menjalin kerjasama ekonomi yang bersifat intensif. Sejak awal menjabat Presiden Jokowi telah menunjukkan perhatiannya kepada Tiongkok, yang dimana hal tersebut menjadi petunjuk dari pergeseran politik luar negeri Indonesia (Andika and Aisyah, 2017). Hubungan bilateral yang terjadi antara Tiongkok dan Indonesia tiap tahunnya mengalami kemajuan yang pesat terutama pada investasi asing yang terus ditanamkan oleh Tiongkok.



Gambar 1.2 Realisasi Investasi Tiongkok di Indonesia Tahun 2019 s.d. 2023

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Seperti yang dilihat pada gambar diatas, sejak tahun 2019 nilai investasi Tiongkok di Indonesia mengalami peningkatan. Nilai investasi pada tahun 2019 senilai US\$4,7 miliar, yang membawa Tiongkok berada pada posisi kedua setelah Singapura. Kemudian dan pada tahun 2020 meningkat menjadi US\$4,8 miliar. Menurut laporan BPS, pada 2021 Tiongkok menanamkan modalnya sebesar US\$3,1 miliar ke Indonesia. Nilai investasi ini berada di peringkat ketiga sebagai investor asing terbesar di Indonesia. Pada tahun 2022 Tiongkok merupakan investor terbesar kedua di Indonesia, yaitu mencapai US\$8,2 miliar. Angka tersebut melonjak dari tahun sebelumnya, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Lalu, pada periode Januari hingga Oktober 2023 investasi yang ditanamkan oleh Tiongkok mencapai US\$5,5 miliar (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kehadiran Tiongkok yang terus mengalami peningkatan terutama pada sektor ekonominya membuat negara-negara G7 yang telah lama menjadi mitra terbesar di Indonesia merasa terancam terutama AS. G7 yang selama ini menjadi mitra terbesar di Indonesia, harus menerima fakta bahwa saat ini pergerakan yang dilakukan oleh Tiongkok semakin meluas. Kehadiran Tiongkok yang terus ditingkatkan bersamaan dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan antara negara tersebut dengan Indonesia, membuat G7 membutuhkan suatu strategi untuk tetap mempertahankan posisinya di Indonesia, maka dari itu penelitian ini berjudul **“Respon G7 Terhadap Kehadiran Tiongkok di Indonesia”** dengan tujuan untuk menganalisis

strategi yang dilakukan oleh G7 untuk menghadapi kehadiran ekonomi Tiongkok di Indonesia.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis mengenai respon yang diberikan oleh G7 terhadap kehadiran Tiongkok di Indonesia, serta peluang dan tantangan yang dilakukan oleh G7 untuk menghadapi Tiongkok di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada salah satu faktor yang paling mempengaruhi terjadinya pembentukan strategi yaitu kehadiran Tiongkok yang memberikan ancaman bagi negara-negara G7 terutama Amerika Serikat (AS) di Indonesia. Sehingga AS bekerjasama dengan negara-negara G7 lainnya untuk membentuk suatu program yang menjadi alternatif dari proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yakni program *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) yang diinisiasi oleh Presiden Joe Biden bersama pemimpin negara G7 pada Juni 2022 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-7 ke-48. Presiden Joe Biden yang telah lama berencana untuk membentuk sebuah program infrastruktur demi menyaingi proyek BRI dengan berfokus pada investasi energi dan pertumbuhan ekonomi hijau. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Biden pada Kamis, 25 Maret 2021 di Washington (Lamarque, 2021). Dengan melalui program PGII akan dilihat mengenai bantuan yang diberikan oleh negara G7 sebagai respon dari peningkatan kehadiran Tiongkok pada sektor ekonomi di Indonesia. Salah satu negara yang bergabung kedalam dua program tersebut yaitu Indonesia yang akan menjadi studi kasus dari penelitian ini.

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbesar di Kawasan Asia Tenggara dan memiliki letak geografis yang strategis yaitu di pusat Kawasan Indo-Pasifik. Indonesia merupakan negara yang menerima bantuan terbesar dari proyek BRI milik Tiongkok yakni berada pada angka US\$171,1 miliar (Setiawati, 2023). Hal tersebut membuat negara G7 yang telah lama menjadi salah satu mitra ekonomi terbesar di Indonesia merasa terancam dengan kehadiran Tiongkok. G7 sendiri menganggap bahwa Indonesia merupakan mitra yang penting, sehingga dengan melalui proyek PGII G7 berusaha menanamkan investasinya dan menjalin kerjasama baru dengan pemerintah Indonesia.

Jangka waktu dari penelitian ini yaitu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dikarenakan dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan antara kerjasama yang dilakukan oleh negara G7 dan Tiongkok bersama pemerintah Indonesia. Adapun, rumusan masalah dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana respon Negara-negara G7 terhadap kehadiran Tiongkok di Indonesia?
2. Bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Negara-negara G7 dalam merespon kehadiran Tiongkok di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana negara G7 merespon kehadiran Tiongkok di Indonesia.
2. Mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi oleh G7 dalam merespon kehadiran Tiongkok di Indonesia.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca khususnya mahasiswa/i program studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mengimbangi investasi Tiongkok di Indonesia.
2. Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan topik yang diambil.

1.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan konsep kebijakan ekonomi luar negeri dengan berfokus pada bantuan luar negeri untuk menganalisis mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan konsep tersebut maka akan dilihat mengenai respon yang dilakukan oleh negara-negara G7 dalam merespon kehadiran Tiongkok di Indonesia.

1.4.1 Kebijakan Ekonomi Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan suatu proses untuk menghasilkan pembuatan keputusan yang sekaligus dipergunakan untuk mempertimbangkan beberapa konsekuensi yang akan

didapatkan dalam kebijakan tersebut. Kebijakan luar negeri dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah perubahan ataupun mempertahankan suatu keadaan. Selain itu, kebijakan luar negeri juga dianggap dapat memberikan perubahan agar dapat sesuai dengan keinginan suatu negara, ataupun untuk mempertahankan sebuah situasi bila terdapat permasalahan yang dilakukan oleh negara lain misalnya seperti negara lain yang berusaha untuk mengubah tatanan ekonomi politik internasional yang ada (Palmer and Morgan, 2006).

Salah satu kebijakan luar negeri yang seringkali digunakan untuk mempertahankan kepentingan negara yaitu kebijakan ekonomi luar negeri. Kebijakan ekonomi luar negeri adalah suatu kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi bidang ekonomi yaitu berpengaruh terhadap arah komposisi, bentuk perdagangan, dan juga pembayaran internasional. Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan ekonomi pada negara tersebut guna mencapai tujuan bersama (Katzenstein, 1977). Para pembuat kebijakan akan berusaha untuk memperkuat aliansi mereka baik itu dalam bentuk aliansi militer ataupun hubungan ekonomi demi menghalangi ancaman yang diberikan oleh pihak lainnya. Kepentingan dan pertimbangan strategi dari aliansi tersebut tentunya

akan memberikan pengaruh terhadap hubungan ekonomi luar negeri antara para sekutu (Gowa, 1994; Mansfield, 1994)

Konsep dari kebijakan ekonomi luar negeri berkaitan dengan kompetensi antar negara untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan hubungan ekonomi luar negeri. Seringkali alasan internal ataupun eksternal yang akan menentukan *power* dari sebuah negara, misalnya suatu individu akan memainkan peran utama dalam hubungan ekonomi yang berada di bawah kondisi perekonomian liberal dan hal tersebut yang membuat ruang lingkup kekuasaan negara semakin berkembang dan mengalami pertumbuhan (Bozyk, 2006).

Negara menjalankan kebijakan ekonomi luar negerinya melalui dua jenis lembaga dan organisasi yaitu sistemik dan khusus yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan ekonomi yang telah disepakati. Untuk merumuskan kebijakan luar negeri, pada umumnya para pembuat kebijakan akan merancang tujuan dan permasalahan yang sedang terjadi, serta memikirkan strategi yang tepat untuk dijalankan dalam menghadapi masalah tersebut. Tujuan dari kebijakan ekonomi luar negeri yaitu untuk mengetahui prioritas-prioritas tertentu dalam hubungan ekonomi antar negara. Pemilihan kebijakan tertentu ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruh penting terhadap tujuan kebijakan ekonomi luar negeri yang tidak hanya berpengaruh ke negara-negara yang

sedang mengalami transformasi namun juga bagi lingkungan eksternalnya. Selain itu, kebijakan ekonomi luar negeri saling bergantung satu sama lain dikarenakan ada mekanisme umpan balik yang terjadi antar negara. Tanpa mencapai satu tujuan, mustahil untuk mencapai tujuan yang lain dan sebaliknya. Negara harus memilih tujuan yang paling penting, fokus pada tujuan tersebut dan meninggalkan tujuan lainnya (Bozyk, 2006).

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep kebijakan ekonomi luar negeri untuk menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan oleh negara G7 dalam merespon kehadiran Tiongkok di sektor perekonomian Indonesia. Kehadiran Tiongkok yang terus meluas terutama melalui kebijakan BRI nya membuat negara-negara G7 yang telah lama menjadi mitra di Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi lain untuk mempertahankan posisinya di Indonesia. Adapun kebijakan yang difokuskan pada konsep ini yaitu kebijakan ekonomi melalui bantuan luar negeri.

1.4.1.1 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument ekonomi yang umum untuk digunakan oleh negara-negara maju demi mencapai tujuan kebijakan luar negeri terutama sejak berakhirnya Perang Dunia II. Bantuan luar negeri atau bantuan asing pada umumnya didefinisikan sebagai dana

pinjaman yang diberikan oleh negara pendonor ke negara penerima baik itu dalam berbentuk sumber daya seperti barang, keterampilan, pengetahuan teknis ataupun dana bentuk hibah seperti dana hibah (hadiah), dan dana pinjaman (dengan suku bunga) (Soeprapto, 1997).

Tujuan dari bantuan luar negeri yaitu untuk menangani kebutuhan kemanusiaan dan pembangunan. Tetapi tidak hanya bertujuan untuk aspek ekonomi namun juga dapat berdampak pada memajukan kepentingan politik dari negara pendonor maupun penerima untuk mencapai kepentingan dari kedua negara yang terlibat dalam kegiatan bantuan luar negeri (Riddle, 2007). Distribusi dari bantuan luar negeri dapat diberikan melalui dua jalur yaitu secara bilateral maupun multilateral. Bantuan bilateral dapat berupa bantuan yang diberikan secara langsung kepada negara penerima. Sedangkan untuk jalur bilateral maka bentuk bantuan akan diberikan oleh lembaga bantuan internasional yang berperan sebagai pihak ketiga antar negara penerima bantuan dan pendonor (Alyssa, 2023).

Menurut Hans Morgenthau, salah satu jenis bantuan luar negeri yaitu bantuan untuk pembangunan ekonomi atau *Official Development Assistance* (ODA) yang merupakan bantuan pemerintah yang secara khusus ditujukan untuk

kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Dalam memberikan bantuan, ODA akan berfokus pada aspek-aspek yang menunjang pembangunan negara, pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dll. Dalam beberapa tahun terakhir bantuan untuk pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat umum untuk dilakukan oleh antar negara. Kebutuhan dana dalam pembangunan ekonomi pada awalnya berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Dana dari luar negeri dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun berupa utang luar negeri (Morgenthau, 1962).

Bagi negara berkembang, bantuan luar negeri merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembiayaan pembangunan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar membuat bantuan pinjaman luar negeri menjadi salah satu alternatif untuk tetap menjalankan pembangunan nasional (Prawoto, 2009). Meskipun hal ini memajukan pembangunan nasional tetapi terdapat aspek negatif yang didapatkan oleh suatu negara jika menerima bantuan luar negeri yang berupa pinjaman dengan bunga atau utang. Jika suatu negara memiliki utang yang besar dari tahun ke tahun maka hal tersebut akan menyebabkan suatu negara

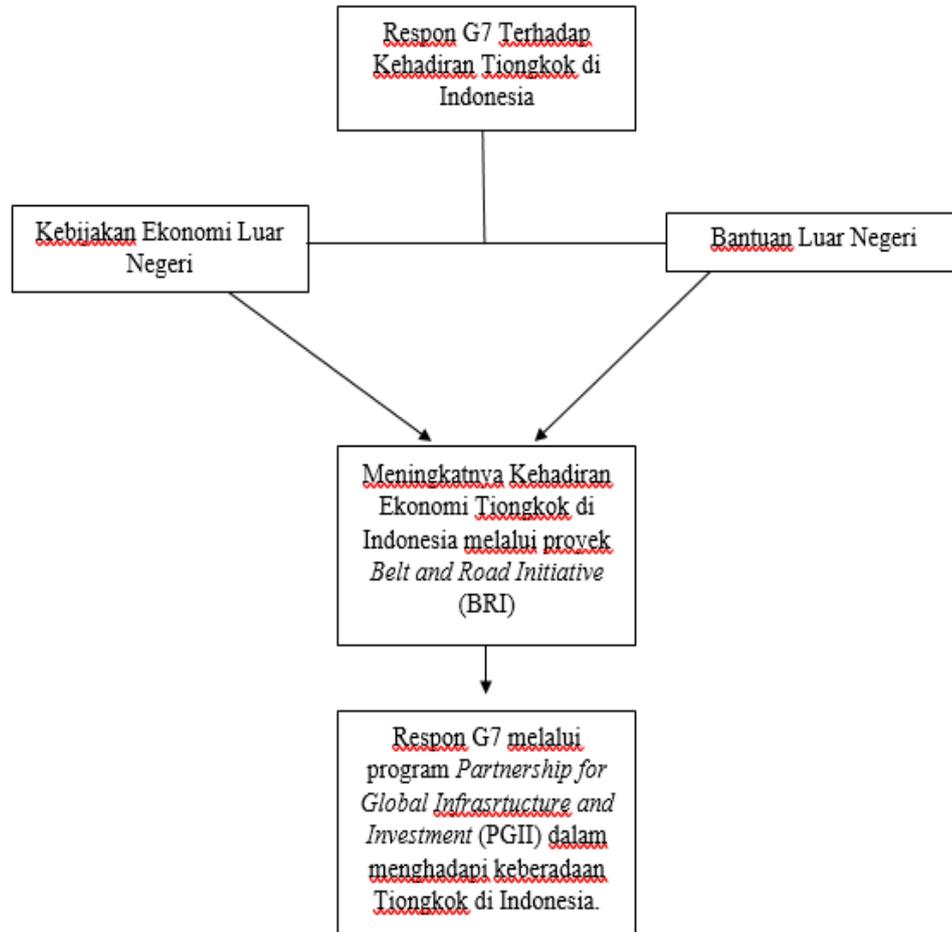
tidak mampu menciptakan sumber-sumber pengembalian dana nya sehingga utang dan bunga yang harus dibayar tiap tahunnya akan mengalami peningkatan dan konsekuensi paling buruk yaitu negara pendonor akan mengklaim proyek yang dilakukan pada hubungan bantuan luar negeri tersebut (Prawoto, 2009).

Namun jika suatu negara dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sangat baik maka hal tersebut dapat membawa efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Bantuan luar negeri juga dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara penerima jika kualitas kebijakan yang digunakan sangat baik. Bantuan luar negeri memiliki keadaan yang berubah di setiap periode dan diharapkan dapat terus membantu perekonomian suatu negara menjadi lebih baik (Burnside and Dollar, 1997).

Teori kedua yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori bantuan luar negeri. Dengan dikutip oleh beberapa ahli, teori ini akan digunakan untuk menganalisa mengenai bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok dengan melalui proyek BRI kepada pemerintah Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan pendanaan terhadap pembangunan nasional milik Indonesia. Selain itu juga akan

digunakan untuk menganalisa respon yang diberikan oleh G7 terhadap kehadiran Tiongkok dengan melalui program PGII.

1.4.2 Model Analisis



Gambar 1.3 Bagan Kerangka Konseptual

(Sumber: Diolah sendiri)

Berikut merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini yang berjudul Respon G7 Terhadap Kehadiran Tiongkok di Indonesia yang dimana peneltiian ini akan menggunakan konsep kebijakan ekonomi luar negeri dan konsep bantuan luar negeri. Kedua konsep tersebut akan menjelaskan mengenai meningkatnya kehadiran Tiongkok terutama pada sektor ekonomi di Indonesia. Peningkatan tersebut terjadi terutama saat

Indonesia memilih untuk bergabung dalam proyek kebijakan ekonomi Tiongkok yakni *Belt and Road Initiative* (BRI) untuk membantu Indonesia dalam menjalankan pembangunan nasionalnya. Dengan meluasnya peran Tiongkok di sektor ekonomi Indonesia, maka akan dilihat mengenai respon dari negara G7 yang telah lama menjadi mitra utama di sektor ekonomi Indonesia terutama Amerika Serikat yang menganggap Tiongkok adalah suatu ancaman tersendiri. Adapun bentuk respon tersebut akan dianalisis melalui program *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) yang merupakan program kebijakan ekonomi dari negara-negara G7 melalui investasi ataupun bantuan luar negeri untuk membantu negara berkembang dalam menjalankan pembangunan nasionalnya. Program tersebut juga dianggap sebagai strategi untuk menghadapi perkembangan Tiongkok. Dengan melalui program PGII maka akan dilihat mengenai respon yang diberikan oleh G7 terhadap perluasan kehadiran Tiongkok di Indonesia, serta akan dianalisis juga mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh G7 dalam menjalankan kebijakannya.

1.4.3 Argumentasi Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka konsep dan penjelasan di latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berasumsi bahwa negara-negara G7 yang selama ini menjadi mitra utama pada sektor ekonomi di Indonesia merasa terancam dengan kehadiran Tiongkok yang semakin meluas terutama pada dengan meningkatkan investasinya sehingga posisi yang dimiliki oleh Tiongkok mengalami peningkatan yang pesat pada

realisasi investasi asing di Indonesia. Maka dari itu, negara-negara G7 terutama AS membutuhkan suatu strategi yang digunakan sebagai respon terhadap kehadiran Tiongkok dengan tujuan untuk dapat mempertahankan eksistensi negara-negara G7 di Indonesia. Untuk itu penelitian ini memiliki argumen pendukung sebagai berikut:

1. Kehadiran Tiongkok pada sektor ekonomi Indonesia terus mengalami perkembangan terutama dengan memberikan bantuan luar negeri berupa penanaman investasi pada pembangunan nasional Indonesia melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) membuat posisi negara G7 terutama AS terancam;
2. G7 yang berisikan negara-negara maju dengan *power* yang besar berusaha untuk mempertahankan posisinya dengan suatu strategi sebagai bentuk dari respon terhadap kehadiran Tiongkok di sektor ekonomi Indonesia;
3. Hasil yang diharapkan dari strategi tersebut yaitu posisi yang dimiliki oleh G7 tidak disingkirkan oleh kehadiran Tiongkok. Selain itu, strategi yang dijalankan juga dapat membuat hubungan antara negara G7 dan Indonesia semakin mengalami peningkatan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Judul/Penulis Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian	Perbedaan Fokus Penelitian

Respon G7 Terhadap Kehadiran Tiongkok di Indonesia.	<p>Kebijakan <i>Belt and Road Initiative</i> Sebagai Alat <i>Soft Power</i> Cina dalam Membangun Hegemoni di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus: Investasi Cina di Indonesia)</p> <p>Oleh: Gerald Theodorus L. Toruan</p>	<p>Penggunaan <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) sebagai alat <i>soft power</i> dalam membangun hegemoni di kawasan Asia Tenggara, salah satunya berupa investasi yang ditanamkan pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara.</p>	<p>Objek penelitian.</p> <p>Fokus kepada penggunaan <i>soft power</i> Tiongkok di kawasan Asia Tenggara khususnya pada investasi Tiongkok di Indonesia.</p> <p>Fokus kepada G7 dalam merespon kehadiran ekonomi Tiongkok di Indonesia. investasi Tiongkok di Indonesia.</p>
	<p><i>The Belt and Road Initiative and China-US Strategic Competition</i></p> <p>Oleh: Minghao Zhao</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi-strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menghadapi proyek BRI milik Tiongkok.</p>	<p>Fokus terhadap strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam melawan proyek BRI milik Tiongkok dengan menggunakan teori perimbangan kekuasaan.</p>

			Fokus terhadap strategi G7 dalam merespon perkembangan Tiongkok di Indonesia dengan menggunakan teori kebijakan ekonomi luar negeri dan bantuan luar negeri.
	<p>Strategi Perimbangan Amerika Serikat di Asia Pasifik terhadap Tiongkok melalui Kebijakan Ekonomi Pada Periode 2017-2019</p> <p>Oleh: Deasifa Aqramina dan Anggun Puspitasari</p>	<p>Strategi perimbangan AS melalui kebijakan <i>America First toward Indo-Pacific</i> dalam menghadapi BRI Tiongkok di kawasan Asia Pasifik.</p>	<p>Fokus terhadap strategi AS dalam mengimbangi kekuatan Tiongkok di Asia Pasifik</p> <p>Fokus terhadap strategi G7 dalam merespon kehadiran ekonomi Tiongkok di Indonesia.</p>
	Rivalitas Ekonomi Amerika Serikat	Rivalitas antara strategi yang digunakan oleh	Perbedaan kedua penelitian ini berada pada kerangka

	<p>VS Republik Rakyat China dan Implikasinya di Asia Tenggara</p> <p>Oleh: Danis Rahman Putra</p>	<p>AS dan Tiongkok dalam memberikan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara.</p>	<p>pemikiran yang digunakan.</p> <p>Penelitian milik Danis Rahman Putra menggunakan kerangka pikir regionalism ekonomi dengan berfokus kepada <i>power</i>.</p> <p>Sedangkan penulis menggunakan kerangka pemikiran yakni kebijakan ekonomi luar negeri dan bantuan luar negeri.</p>
	<p>Strategi <i>Rebalancing</i> Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik</p> <p>Oleh: Vanilla Planifolia</p>	<p>Kembalinya kehadiran AS di Asia-Pasifik sebagai upaya <i>rebalancing</i> terhadap Tiongkok yang dianggap sebagai suatu ancaman baru.</p>	<p>Fokus penelitian pada upaya <i>rebalancing</i> AS terhadap Tiongkok di Asia-Pasifik, dengan menggunakan teori <i>Balance of Threat</i>.</p>

			Fokus penelitian pada G7 dalam merespon kehadiran ekonomi Tiongkok di Indonesia.
--	--	--	--

Kelima penelitian tersebut akan digunakan sebagai referensi dan acuan dalam penelitian ini yang dimana penulis mengambil beberapa topik penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu mengenai respon G7 terhadap kehadiran Tiongkok di Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini akan berfokus kepada respon negara-negara G7 terhadap kehadiran Tiongkok dalam sektor perekonomian Indonesia. Bentuk dari respon tersebut akan dijelaskan dengan melalui dijalankannya program *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) yang dibentuk oleh G7 yang diinisiasi oleh AS untuk merespon kehadiran Tiongkok yang terus meluas di sektor ekonomi. Melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok terus menjalankan kebijakan ekonominya di negara-negara berkembang salah satunya di Indonesia. Dengan berfokus pada investasi dan bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Tiongkok di beberapa sektor yang ada di Indonesia. Penulis juga akan menjabarkan peningkatan investasi asing yang dilakukan oleh kedua negara di Indonesia dengan batasan tahun 2019 hingga 2023. Tentunya, akan terdapat perbedaan yang dilakukan oleh penulis dan penelitian-penelitian terdahulu agar mendapatkan aspek baru yang diteliti.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu, penelitian kualitatif dan deskriptif yang merupakan studi pustaka pada suatu objek atau subjek yang akan diteliti. Studi pustaka yang akan digunakan yakni berkaitan dengan topik yang dipilih yakni ‘Respon G7 Terhadap Kehadiran Tiongkok di Indonesia’. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan ataupun memberikan pemahaman terhadap bentuk fenomena yang sedang terjadi secara alamiah, dengan memfokuskan terhadap proses dari interaksi komunikasi yang dilakukan oleh sang peneliti dan permasalahan yang akan diteliti (Herdiansyah, 2010).

1.6.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan yakni data sekunder. Data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan berdasar pada penelitian sebelumnya. Biasanya data yang didapatkan berasal dari jurnal, surat kabar, skripsi, buku, ataupun berita dari situs online resmi dan situs resmi milik pemerintah. Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan sumber yang telah di teliti sebelumnya yang berkaitan dengan isu yang dibahas oleh penulis.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka dengan menganalisis sejumlah referensi yang terdiri dari dokumen, jurnal, buku, media elektronik, serta beberapa situs web resmi. Dari hasil analisis bacaan tersebut, peneliti memilih dan menyesuaikan dengan rumusan masalah penelitian yang akan diteliti.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bentuk sistem dalam mengorganisasikan suatu data yang dipilih dengan tujuan yaitu mendapatkan bentuk kesesuaian. Data-data yang didapatkan akan diseleksi dan disajikan kembali oleh peneliti dengan menggunakan teknik analisis data yaitu deskriptif analisis. Melalui metode deskriptif analisis data tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dengan mendeskripsikan masalah yang ada kemudian, diolah sehingga menghasilkan sebuah jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Berikut uraian sistematika penulisan penelitian yang akan disusun ke dalam lima bab, sebagai berikut;

Bab 1 Pendahuluan berisikan latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka memuat deskripsi mengenai teori yang akan diteliti dengan mempelajari argumen dan tinjauan teori yang relevan sebagai landasan dari penelitian.

Bab 3 Gambaran Umum penjelasan mengenai hubungan ekonomi Tiongkok dengan Indonesia.

Bab 4 Analisis dan Hasil Penelitian berisikan hasil penelitian yang sebelumnya telah melalui proses pengujian argumentasi dengan berlandaskan data-data yang telah dikumpulkan.

Bab 5 Kesimpulan berisi rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan mencakup capaian hipotesis akhir dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang telah diajukan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori yang akan digunakan pada penelitian ini, yang dimana terdapat dua konsep untuk menganalisis rumusan masalah yang diambil. Konsep pertama yaitu kebijakan ekonomi luar negeri yang akan digunakan untuk menganalisis mengenai kebijakan ekonomi yang digunakan oleh Tiongkok dalam memperluas kehadiran ekonominya serta untuk menganalisis rumusan masalah pertama yakni mengenai strategi ekonomi yang digunakan oleh negara-negara G7 dalam merespon kehadiran Tiongkok di Indonesia. Adapun strategi tersebut akan berfokus pada bantuan luar negeri yang diberikan oleh AS dengan melalui program PGII yang akan dijelaskan dengan menggunakan konsep kedua yakni bantuan luar negeri. Selanjutnya kedua teori tersebut juga akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua yakni implementasi strategi yang dilakukan oleh negara G7 dalam mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Dalam bab ini kedua teori tersebut akan dijelaskan diawali dengan penjelasan mengenai definisi umum, pendapat dari para ahli terhadap masing-masing teori, dampak positif ataupun negatif yang dihasilkan bagi suatu negara, serta seberapa pentingnya bagi suatu negara. Pada bab ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, penelitian-penelitian tersebut akan digunakan sebagai referensi dan menjadi acuan dari penelitian ini sehingga dapat dilihat mengenai perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian terdahulu.

2.1 Kebijakan Ekonomi Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan suatu proses untuk menghasilkan pembuatan keputusan yang sekaligus dipergunakan untuk mempertimbangkan beberapa konsekuensi yang akan didapatkan dalam kebijakan tersebut. Salah satu kebijakan luar negeri yang seringkali digunakan untuk mempertahankan kepentingan negara yaitu kebijakan ekonomi luar negeri. Kebijakan ekonomi luar negeri merupakan suatu kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah baik itu secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi bidang ekonomi misalnya terhadap arah komposisi, bentuk perdagangan, dan juga pembayaran internasional. Kebijakan ekonomi luar negeri juga dianggap sebagai bentuk upaya yang digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi (Katzenstein, 1977).

Kebijakan ekonomi luar negeri mempengaruhi beberapa struktur domestik yang terbagi menjadi dua pendekatan yaitu yang pertama berfokus pada berbagai fitur politik dan teknologi yang berasal dari sistem internasional dan mempengaruhi strategi kebijakan ekonomi luar negeri. Sedangkan pendekatan kedua yaitu berfokus mengkaji secara rinci faktor-faktor domestik, birokrasi, dan proses pembuatan kebijakan (Katzenstein, 1977). Joanne Gowa dan Edward Mansfield, berpendapat bahwa para pembuat kebijakan akan berusaha untuk memperkuat aliansi mereka baik itu dalam bentuk aliansi militer ataupun hubungan ekonomi demi menghalangi ancaman yang diberikan oleh pihak lainnya. Kepentingan dan

pertimbangan strategi dari aliansi tersebut tentunya akan memberikan pengaruh terhadap hubungan ekonomi luar negeri antara para sekutu (Gowa, 1994; Mansfield, 1994).

Pada umumnya kebijakan ekonomi luar negeri haruslah bersifat aktif yang dimana disatu sisi memprakarsai tindakan yang tidak dilakukan oleh entitas ekonomi sendiri, dan di sisi lain yaitu membatasi aktivitas yang secara keseluruhan tidak memberikan keuntungan terhadap negara. Kebijakan ekonomi luar negeri memiliki peran penting pada saat terjadinya perbedaan antara preferensi negara dan entitas ekonomi individu (Gu, Humphrey and Messner, 2008). Menurut Bozyk, kebijakan ekonomi luar negeri juga harus mencakup internal ekonomi dan hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lainnya. Kebijakan ini dibentuk agar efek yang dihasilkan dapat dirasakan oleh aktivitas asing yang secara langsung terlibat pada sektor ekonomi negara. Selain berdampak pada sektor ekonomi, kebijakan ini juga dapat menyebabkan perubahan terhadap aspek sosial dan politik, dikarenakan karakter yang dimiliki didasarkan pada keseimbangan yang memberikan manfaat kepada aspek ekonomi, sosial dan politik baik itu dalam jangka waktu yang pendek ataupun panjang (Bozyk, 2006).

Beberapa ilmuwan politik yang melakukan penelitian mengenai kebijakan ekonomi luar negeri beranggapan bahwa kebijakan ini merupakan analisis distribusi kekuasaan yang terjadi antara negara-negara dalam sistem internasional (Rohrlich, 1987). Hans Morgenthau mencatat bahwa negara

terkadang mengejar kebijakan ekonominya demi kepentingan mereka sendiri, dan kebijakan ekonomi yang paling sering digunakan yang memiliki instrument politik didalamnya (Morgenthau, 1972). Aktor-aktor yang memberikan pengaruh terhadap tujuan dari kebijakan ekonomi luar negeri terdiri dari kelompok kepentingan utama dan kelompok politik. Aktor pertama yang mewakili hubungan produksi (termasuk industri, keuangan, perdagangan, dan pertanian) dan aktor kedua yang berasal dari struktur otoritas politik (terutama birokrasi negara dan partai politik) (Katzenstein, 1977). Menurut Stephen Krasner, ia memandang negara sebagai aktor yang memiliki motivasi otonom yang mampu memimpin kebijakan dalam mengejar prioritas dirinya. Ia juga berasumsi bahwa kebijakan ekonomi luar negeri merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan daya saing, menjamin kebutuhan material, dan mempromosikan tujuan-tujuan kebijakan luar negerinya (Krasner, 1978). Beberapa negara yang membutuhkan dukungan akan menerapkan kebijakan ekonomi luar negeri yang diperuntukkan dalam memperkuat dukungan domestik terhadap aliansi di negara penerima (Skalnes, 1998).

Negara menjalankan kebijakan ekonomi luar negerinya dengan melalui dua jenis lembaga dan organisasi yaitu sistemik dan khusus yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan ekonomi yang telah disepakati. Kelompok pertama mencakup presiden, parlemen, pemerintah, dan entitas ekonomi lainnya. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari bea cukai atau lembaga yang mengatur kegiatan ekonomi luar negeri, bank

pembiayaan ekspor, dan sejenisnya. Peran presiden dalam kebijakan ekonomi luar negeri yaitu menjadi pusat pengambilan keputusan dengan kekuasaan yang tertinggi dan menjadi promotor dari kebijakan tersebut, yaitu dengan melakukan kunjungan ke luar negeri dan menerima politisi asing sehingga kebijakan yang telah disepakati akan berjalan dengan efektif. Parlemen adalah badan legislatif, yang mengambil resolusi yang akan dilakukan oleh pemerintah dan entitas yang melakukan aktivitas ekonomi luar negeri. Resolusi-resolusi ini merupakan hasil dari sejumlah besar faktor, baik objektif maupun subjektif, yang bergantung pada negara tertentu atau juga pada lingkungan eksternalnya. Pemerintah menjalankan peran ganda dalam membentuk kebijakan ekonomi luar negeri eksekutif dan pengambilan keputusan (Bozyk, 2006).

Tujuan dari kebijakan ekonomi luar negeri yaitu untuk mengetahui prioritas-prioritas tertentu dalam hubungan ekonomi antar negara. Prioritas tersebut dapat bersifat umum ataupun khusus. Tujuan umum dari kebijakan ekonomi luar negeri meliputi pemilihan jenis kebijakan yakni perdagangan bebas atau proteksionis, dan otonom atau kontraktual. Pemilihan kebijakan tertentu ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruh penting terhadap tujuan kebijakan ekonomi luar negeri yang tidak hanya berpengaruh ke negara-negara yang sedang mengalami transformasi namun juga bagi lingkungan eksternalnya. Selanjutnya yaitu tujuan khususnya dapat berupa peningkatan ekspor atau impor, peningkatan jumlah investasi asing di dalam negeri atau investasi yang dilakukan di luar

negeri, kebangkitan ekonomi dengan melalui percepatan tingkat pertumbuhan dengan meningkatkan ekspor. Lalu juga dapat mencakup peningkatan kualitas dan modernitas output melalui impor teknologi, pengetahuan, lisensi, dan sejenisnya (Bozyk, 2006).

Kebijakan ekonomi luar negeri tiap negara tentunya berasal dari kepentingan nasionalnya yang akan mengutamakan keberhasilan ekonomi negaranya. Kepentingan-kepentingan ini mencakup penciptaan lapangan kerja yang relatif stabil dan berpenghasilan tinggi, pemeliharaan stabilitas harga, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang maksimal, dan jaring pengaman sosial untuk menyediakan solusi terhadap gangguan yang terjadi di sektor ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut akan didapatkan jika perekonomian suatu negara berfungsi secara keseluruhan. Untuk mencapai hal itu, maka negara akan mengeluarkan kebijakan ekonomi luar negeri dengan mempertimbangkan secara keseluruhan dampak yang akan dihasilkan dari kebijakan yang digunakan dan perkembangan yang berasal dari luar negeri. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu sangatlah penting bagi negara adidaya ekonomi global, salah satunya AS dikarenakan dampak eksternal yang dihasilkan dapat mempengaruhi perekonomiannya sendiri (Bergsten, 2005).

Secara umum kebijakan ekonomi luar negeri digunakan sebagai pendekatan yang menentukan pengaruh negara terhadap dasar kerja sama ekonomi dengan negara lainnya. Dalam praktiknya, kebijakan ekonomi luar negeri terbagi dalam jumlah kebijakan sektoral yang berdasarkan pada

bentuk hubungan ekonomi luar negeri seperti kebijakan perdagangan. Seiring berjalannya waktu, perputaran modal, tenaga kerja, teknologi, dan jasa menjadi objek hubungan ekonomi internasional, yang membuat kebijakan perdagangan diperluas agar dapat mencakup cara-cara lain dalam membangun pengaruh suatu negara dengan seluruh hubungan ekonomi luar negeri lainnya.

Salah satu kebijakan yang saat ini sering digunakan sebagai pengukur dari kebijakan ekonomi luar negeri yaitu kebijakan modal asing yang mencakup kebijakan kredit, investasi asing langsung, dan investasi portofolio. Investasi asing atau biasa disebut dengan PMA merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menanamkan modalnya terhadap negara tertentu. Ruang lingkup dari kebijakan ini juga mencakup pengaruh yang dihasilkan oleh suatu negara terhadap investasi luar negeri yang dilakukan berasal dari perusahaan-perusahaan asing. Kebijakan modal tersebutlah yang menciptakan kondisi sistemik dan politik yang memadai serta kondisi hukum, keuangan, dan mata uang, yang berfungsi untuk mendorong para investor asing dalam menanamkan modalnya di suatu negara (Bozyk, 2006).

Dalam kasus-kasus kebutuhan strategis, negara-negara *super power* akan memberikan preferensi perdagangan kepada sekutu mereka. Negara-negara besar melakukan hal tersebut dalam upaya untuk mendorong pembentukan koalisi domestik di negara sekutu yang akan mendukung hubungan ekonomi yang erat dengan negara pemberi bantuan. Tanggapan

penerima bantuan terhadap kebijakan tersebut juga dapat memberikan informasi berharga bagi negara pemberi tentang kendala penerima bantuan sebagai sekutu. Hubungan politik dan ekonomi yang lebih dekat pada gilirannya akan meningkatkan aspek pencegahan terhadap ancaman atau permasalahan yang ada (Skalnes, 1998).

Kebijakan ekonomi luar negeri diharapkan saling bergantung satu sama lain, sehingga terjadi mekanisme umpan balik di antara mereka. Sering kali, terdapat kontradiksi antara tujuan-tujuan kebijakan ekonomi luar negeri. Hal ini menyangkut tujuan dengan jangka waktu yang sama ataupun dengan jangka waktu yang berbeda. Tanpa mencapai satu tujuan, mustahil untuk mencapai tujuan yang lain dan sebaliknya. Negara dapat memberlakukan pembatasan atau larangan impor beberapa teknologi yang merupakan alat pertahanan negara, termasuk persenjataan. Negara juga dapat membatasi secara administratif impor, misalnya, produk yang berbahaya bagi kesehatan, obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar pengobatan yang berlaku di suatu negara, bahan makanan yang tidak memenuhi standar sanitasi, tanaman dan hewan dari wilayah yang terkena penyakit berbahaya (Bozyk, 2006).

Kebijakan ekonomi luar negeri sebagian besar merupakan respons terhadap keharusan strategis yang dihadapi negara-negara besar. Dengan demikian, kebijakan ekonomi luar negeri mewakili lebih dari sekedar upaya yang dilakukan oleh suatu negara dalam memaksimalkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dalam menerapkan kebijakan, para pembuat kebijakan

akan berusaha untuk memperkuat hubungan aliansi dan menghalangi serangan pihak ketiga (Skalnes, 1998). Salah satu contoh pada kebijakan ekonomi luar negeri yaitu kebijakan yang digunakan Amerika yang dapat dapat ditafsirkan sebagai sebuah pilihan politik. Beberapa penafsiran tentang kebijakan ekonomi luar negeri Amerika sepakat dalam menekankan keuntungan politik yang dalam beberapa dekade terakhir telah diperoleh Amerika Serikat yang memungkinkannya untuk mengambil pendekatan *laissez faire* dalam masalah ekonomi internasional (Katzenstein, 1977). Kebijakan ekonomi luar negeri sebagian merupakan respons terhadap keharusan strategis yang dihadapi negara-negara besar. Dengan demikian, kebijakan ekonomi luar negeri mewakili lebih dari sekadar upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau kelompok kepentingan.

2.1.1 Bantuan Luar Negeri

Salah satu kebijakan ekonomi yang digunakan oleh negara-negara maju untuk mempromosikan kebijakan ekonomi luar negerinya yaitu dengan memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang yang sedang menjalankan ataupun membutuhkan dana untuk memajukan pertumbuhannya. Bantuan luar negeri merupakan instrument ekonomi yang digunakan oleh negara-negara maju untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya (Rix, 1993). Bantuan luar negeri awalnya hanya berupa dana ataupun pemberian uang, namun seiring berjalannya waktu

bantuan yang diberikan juga dapat berupa transfer teknologi, bantuan teknis, hibah uang tunai, pinjaman lunak, penghapusan dan keringanan utang, ataupun berbentuk komoditas seperti makanan dan obat-obatan dari negara pendonor ke negara penerima (Holsti, 1992). Jauh sebelum itu, pemberian bantuan luar negeri yang paling utama yaitu bantuan militer. Tetapi untuk saat ini militer bukanlah satu-satunya aspek yang harus diutamakan oleh negara, seiring berjalannya waktu faktor ekonomi juga menjadi prioritas yang menjadi dasar bagi suatu negara. Dalam beberapa decade terakhir, proyek bantuan luar negeri mencakup tujuan untuk meningkatkan infrastruktur di negara penerima (Hunt, 2016).

Bantuan luar negeri memiliki tujuan untuk menangani permasalahan kebutuhan manusia ataupun pembangunan yang diberikan oleh negara pendonor ke negara penerima. Tujuan lainnya juga untuk memberikan sumber daya demi memajukan kepentingan politik antar kedua negara (Riddle, 2007). Menurut Alan Rix, pemberian bantuan luar negeri tidak terlepas dari motif yang dibawa oleh negara pendonor atau bisa dikatakan instrument ini digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara pendonor kepada negara penerima bantuan (Rix, 1993). Sedangkan bagi Martinussen dan Pedersen, bantuan luar negeri merupakan sebuah bentuk kerjasama pembangunan internasional dengan berbagai aktor yang masing-masing memiliki tujuan, ataupun strategi yang

dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat melalui jenis bantuan yang diberikan kepada negara penerima (Martinussen and Pedersen, 2003).

Bantuan luar negeri disebut sebagai kebijakan, namun para ahli lainnya menganggap bahwa bantuan luar negeri merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan sebuah ‘kebijakan’. Salah satu ahli yang berpendapat seperti itu yakni Hans Morgenthau. Ia memandang bahwa bantuan luar negeri digunakan sebagai alat untuk menjalankan tujuan dari kebijakan luar negeri, sehingga pelaksanaannya dengan memberikan bantuan yang akan memberikan pengaruh terhadap konsep kedaulatan suatu negara (Morgenthau, 1962). Tujuan dari pemberian bantuan luar negeri dikategorikan dalam empat kategori. Pertama, sebagai *diplomatic purpose* yang merupakan tujuan untuk meliputi ranah politik dan keamanan internasional. Kedua, sebagai *development purpose* yakni untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ketiga, *humanitarian purpose* sebagai tujuan negara pendonor untuk mengurangi angka kemiskinan di negara penerima bantuan. Keempat atau yang terakhir yakni sebagai *commercial purpose* yang dimana pemberian bantuan luar negeri seringkali dilakukan atas pertimbangan komersial karena dianggap berpotensi memberi kontribusi terhadap ekonomi negara pendonor (Lancaster, 2007).

Menurut Hans Morgenthau, terdapat enam jenis bantuan luar negeri yakni sebagai berikut (Morgenthau, 1962).

1. Bantuan kemanusiaan yang tidak memiliki aspek politik didalamnya dikarenakan bantuan kemanusiaan akan terjadi jika suatu negara mengalami tragedy ataupun bencana sehingga membutuhkan bantuan dari negara lainnya.
2. Bantuan subsisten yaitu jenis bantuan ini memiliki sifat yang berjangka panjang dan berkesinambungan dan bantuan ini akan diberikan oleh negara penerima jika negara tersebut mengalami bencana sehingga jika bantuan tersebut berhenti maka kehidupan masyarakat di negara penerima akan hancur.
3. Bantuan militer yang diberikan dengan berupa pendanaan untuk alat-alat militer dan bantuan sumber daya manusia misalnya pengiriman pasukan. Bantuan ini akan terjadi jika suatu negara penerima menerima ancaman seperti terjadinya perang ataupun serangan terong.
4. Bantuan penyuapan (*bribery*) merupakan bantuan yang terjadi dengan bersifat sembunyi-sembunyi ataupun penyuapan dikarenakan seringnya terjadi praktik sogokan dengan dalih dan penamaan bantuan untuk pembangunan ekonomi. Bantuan ini terjadi terutama pada masa kejayaan colonial Eropa.

5. Bantuan *prestise* yakni jenis bantuan yang diberikan oleh negara pendonor yang mengharapkan adanya keuntungan timbal balik. Pemberian bantuan ini juga ditunjukkan untuk meningkatkan hubungan politik antara negara pengirim dengan negara penerima.
6. Bantuan untuk pembangunan ekonomi yang dimana jenis bantuan ini paling sering digunakan pada masa ini. Dua faktor yang menjadi penentu dari pelaksanaannya yaitu pembangunan ekonomi yang tidak merata di beberapa negara sehingga dengan adanya bantuan ini dapat meningkatkan intensitas hubungan kerja sama antar negara. Pemberian bantuan pembangunan ekonomi tidak hanya berbentuk pemberian modal saja namun juga berupa pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi di negara penerima bantuan.

OECD mendefinisikan bahwa bantuan untuk pembangunan ekonomi atau (*official development assistance/ODA*) merupakan bantuan pemerintah yang secara khusus ditunjukkan untuk kesejahteraan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Dalam memberikan bantuan, ODA akan berfokus pada beberapa bidang yang dapat menunjang pembangunan negara seperti pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengurangan angka pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan mendukung

tata pemerintahan yang baik (OECD, 2022b). Kebutuhan dana dalam pembangunan ekonomi pada umumnya berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Dana dari luar negeri dapat berupa bantuan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun berupa utang luar negeri (Prawoto, 2009).

Kebutuhan akan modal asing atau utang luar negeri didasarkan atas adanya dua permasalahan. Menurut Chenery dan Strout, terdapat dua permasalahan yang menjadi dasar dari kebutuhan modal asing, pertama yaitu jurang saving (*saving gap*) yang dimana negara berkembang sedang mengalami pendapatan yang rendah sehingga menyebabkan penyimpanan masyarakatnya menjadi rendah (Chenery and Strout, 1966). Namun disisi lain negara tersebut membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan pembangunan ekonomi, dana tersebut dapat diterima melalui bantuan luar negeri ataupun investasi yang besar-besaran oleh negara pendonor. Kedua, jurang devisa (*foreign exchange gap*) yang merupakan kebutuhan devisa untuk mengimpor barang modal demi menggerakkan industri dalam negeri di negara berkembang sangat tinggi, dilain sisi terdapatnya batasan dari devisa negara akibat ekspor yang relative lebih rendah. Dengan demikian, untuk menutup kebutuhan devisa tersebut maka suatu negara memerlukan adanya utang ataupun PMA (Easterly, 2003).

Bantuan ekonomi luar negeri dimulai dengan dicetuskannya *Marshall Plan* oleh AS yang merupakan bentuk bantuan untuk rehabilitasi negara-negara Eropa Barat dan Selatan. Sejak saat itu implementasi bantuan luar negeri terus mengalami peningkatan dan perluasan isu. (Hunt, 2016) Terdapat dua distribusi bantuan luar negeri yang digunakan yaitu secara bilateral dan multilateral. Bantuan bilateral merupakan bantuan yang diberikan secara langsung kepada negara penerima. Sedangkan bantuan multilateral adalah bentuk bantuan yang menempatkan lembaga bantuan internasional sebagai pihak ketiga antar negara pemberi donor dengan negara penerima. Contoh bantuan bilateral adalah bantuan yang secara umum diberikan negara melalui lembaga bantuan luar negeri suatu negara, seperti USAID (Amerika Serikat), AusAid (Australia), JICA (Jepang), SIDA (Swedia), dan lain sebagainya. Sedangkan, bantuan multilateral diberikan melalui lembaga penyalur bantuan yang berperan sebagai perantara seperti Asian Development Bank (ADB) dan PBB (Alyssa, 2023).

Selain itu, menurut Alan Rix terdapat tiga motif dari negara pendonor ketika memberikan bantuan luar negeri. Pertama adalah motif kemanusiaan yakni dengan tujuan agar dapat mengurangi kemiskinan di negara berkembang ataupun untuk membantu negara yang sedang mengalami kekacauan misalnya saat tertimpa bencana. Kedua yaitu motif ekonomi dengan tujuan agar hubungan antara

kedua negara tetap terjalin baik itu dengan melalui peningkatan kerjasama ataupun melalui penanaman investasi di negara penerima. Ketiga yakni motif politik dengan tujuan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan posisi negara pendonor di negara penerima, dengan melalui bantuan luar negeri diharapkan agar kepentingan negara pendonor dapat terjalin di negara penerima (Rix, 1993).

Dalam beberapa kasus bantuan luar negeri ditentukan dengan melihat perilaku dari sikap negara penerima. Jika sikap target sesuai dengan yang diharapkan oleh pendonor, maka pendonor akan memberi hadiah (*rewards*) berupa bantuan yang berkesinambungan. Namun, jika sikap yang diberikan oleh target tidak sesuai dengan apa yang diharapkan negara pendonor, maka negara pendonor akan mengeluarkan sikap paksaan (*coercion*) seperti menghentikan bantuan dengan harapan agar negara penerima akan mempertimbangkan sikapnya kembali. Melalui cara tersebut maka negara pendonor akan memanipulasi bantuan luar negeri untuk tujuan politik atau aspek lain untuk mencapai kepentingan nasional dengan negara pendonor (Soeprapto, 1997).

Namun hal tersebut tidak mengesampingkan fakta bahwa bantuan luar negeri memberikan efek yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara berkembang. Kebutuhan pembiayaan pembangunan demikian besar tetapi sumber dana dalam negeri masih relatif terbatas. Bantuan luar negeri

tersebut digunakan untuk menutupi selisih tabungan dalam negeri dengan investasi dan menutup kebutuhan devisa akibat selisih tabungan ekspor dan impor. Adanya pendanaan yang diberikan oleh bantuan luar negeri memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran lebih tinggi dari yang dapat dilakukan. Jika dana tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka bantuan yang diberikan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya jika tidak dialokasikan dan dikelola secara tepat, bantuan luar negeri akan menimbulkan masalah terhadap manajemen ekonomi makro dalam bentuk beban pembayaran utang yang sangat tinggi (Prawoto, 2009).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bantuan luar negeri dapat memberikan efek positif pada pertumbuhan ekonomi. Burnside & Dollar menemukan bahwa bantuan luar negeri memiliki efek positif pada pertumbuhan hanya di negara-negara penerima yang memiliki kebijakan fiskal, moneter dan perdagangan yang baik. Selain itu, bantuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara penerima jika kualitas kebijakan mereka cukup baik (Burnside and Dollar, 1997). Menurut Umar Juoro, bantuan luar negeri dipandang memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya.

Alasan lainnya yaitu aliran dari bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang dimana investasi tersebut dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya (Juoro, 1994).

Disisi lain, banyak juga riset yang menemukan efek negatif bantuan luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh bantuan pada pertumbuhan mungkin negatif pada tingkat aliran masuk bantuan yang tinggi. dampak negatif yang diberikan oleh bantuan luar negeri yaitu dikutip dari *Foreign Assistance: Objectives and Consequences* oleh Keith Griffin dan John Enos menganggap bahwa bantuan luar negeri memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Bantuan yang diberikan membuat pemerintah meningkatkan pengeluaran yang dapat mengurangi dorongan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sebagainya (Enos and Griffin, 1971). Hansen & Tarp menemukan bahwa efektivitas bantuan tergantung pada investasi dan modal manusia di negara penerima dan bantuan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ketika tidak mengontrol variabel-variabel ini (Hanse and Tarp, 2001).

Namun hal tersebut tidak mengesampingkan fakta bahwa bantuan luar negeri memberikan efek yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara berkembang. Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang sangat besar membuat

suatu negara membutuhkan adanya sumber dana dari luar negeri, dikarenakan anggaran dalam negara masih relative terbatas, Sumber dana tersebut dapat berasal dari PMA. Jika pemberian bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik maka negara pemberi bantuan maupun negara penerima akan mendapatkan manfaat dari adanya bantuan luar negeri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Setiap penelitian membutuhkan sebuah *research* atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan berkaitan dengan judul yang diangkat. Walaupun memiliki keterkaitan tetapi terdapat perbedaan baik itu dari sudut pandang, kerangka berfikir, atau tujuan yang berbeda, maka dari itu penelitian terdahulu digunakan sebagai sebuah penegasan pada penelitian ini. Penulis mengambil lima penelitian terdahulu yang akan membantu dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Penelitian **pertama** berjudul Kebijakan *Belt and Road Initiative* Sebagai Alat *Soft Power* Cina Dalam Membangun Hegemoni di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus: Investasi Cina di Indonesia) oleh Gerald Theodorus L. Toruan. Dalam penelitian ini membahas mengenai upaya Tiongkok yang ingin menciptakan kekuatan baru di dunia dengan melalui kebijakan *Belt and Road Initiative* yang berfokus kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara terutama di Indonesia. Walaupun memiliki studi kasus yang sama yaitu negara Indonesia, namun perbedaan penelitian ini

dengan yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada objek penelitiannya. Pada penelitian yang ditulis oleh Gerald berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mengembangkan hegemoninya di Indonesia, sedangkan penulis berfokus kepada respon G7 terhadap kehadiran Tiongkok di Indonesia. Pada penelitian ini, kebijakan BRI yang dimiliki oleh Tiongkok dianggap sebagai *soft power* dalam membangun kekuatan baru di dunia salah satunya di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dari kebijakan tersebut yaitu untuk mengubah perhatian internasional dan berupaya untuk menggantikan posisi negara *super power* di dunia. Program BRI yang sejalan dengan proyek Presiden Jokowi yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tentunya merasa tertarik dengan program BRI ini sehingga menerima kerjasama yang ditawarkan oleh Tiongkok dengan tetap mengedepankan kedaulatan negara. Presiden Jokowi yang ingin agar pemerataan pembangunan di Indonesia tercipta, tentunya membutuhkan investasi yang berasal dari luar negeri sehingga menerima investasi dari Tiongkok. Melalui kerjasama ini diharapkan kepentingan nasional dari kedua negara dapat terwujud.

Selanjutnya penelitian **kedua** yaitu ditulis oleh Minghao Zhao dengan judul *The Belt and Road Initiative and China-US Strategic Competition*. Dalam penelitian ini Minghao menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh AS dalam mengimbangi proyek BRI Tiongkok khususnya di kawasan Indo-Pacific. Adapun tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teori perimbangan kekausaan yang

dimana menjelaskan mengenai strategi AS melalui program *Build Back Better World* (B3W) untuk lebih memahami persaingan yang terjadi antara Washington dan Beijing. Sedangkan penulis berfokus kepada strategi G7 dengan melalui program *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) untuk merespon kehadiran ekonomi Tiongkok di Indonesia dengan menggunakan konsep kebijakan ekonomi luar negeri dan bantuan luar negeri. Program yang digunakan oleh peneliti merupakan lanjutan atau versi upgrade dari program B3W yang diteliti oleh Minghao, sehingga terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penulis juga membatasi studi kasus dengan berfokus pada negara Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Minghao ini menjelaskan bahwa proyek BRI memberikan dampak yang sangat besar bagi persaingan antara AS dan Tiongkok terutama di kawasan Indo-Pasifik dengan sektor ekonomi digital. Persaingan yang terjadi antara AS dan Tiongkok ini telah terjalin sejak lama, dan kedua negara ini seakan akan memaksa negara-negara berkembang lainnya untuk memihak salah satu dari kedua negara superpower tersebut. Dengan melalui program B3W, AS bekerjasama dengan pemimpin negara G7 untuk menghadapi proyek BRI Tiongkok. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk menghadapi proyek BRI milik Tiongkok maka AS mengajak sekutunya untuk merilis program yang sama dengan BRI yakni program B3W. Dengan adanya program tersebut akan membantu negara-negara berpenghasilan rendah untuk pembangunan

infrastrukturnya, AS juga menconba untuk membatasi pergerakan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dikarenakan pengaruh yang diberikan oleh proyek BRI ini sangat berdampak bagi persaingan antara kedua negara *great power* tersebut.

Penelitian ketiga yang penulis ambil sebagai referensi yaitu Rivalitas Ekonomi Amerika Serikat vs Republik Rakyat Tiongkok dan Implikasinya di Asia Tenggara oleh Danis Rahman Putra. Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada kerangka pemikiran yang digunakan, penelitian yang ditulis oleh Danis menggunakan kerangka pikir regionalism ekonomi dengan berfokus kepada *power*, sedangkan penulis menggunakan konsep kebijakan ekonomi luar negeri dan bantuan luar negeri. Rivalitas yang terjadi antara AS dan Tiongkok membuktikan bahwa persaingan kedua negara ini lebih berfokus kepada bidang perekonomian namun tidak mengganggu aspek lainnya terutama politik. Dengan melalui *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang dipimpin oleh AS dan Tiongkok memimpin *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), kedua negara saling menggabungkan kekuataannya terhadap regionalism ekonomi. Dengan memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kepentingan ekonomi masing-masing dan kepentingan politik yang dilaksanakan sebagai perimbangan kekuasaan di kawasan. Asia Tenggara yang menjadi salah satu kawasan untuk kedua negara tersebut menjalankan rivalitasnya menjadi objek rebutan dan implikasinya memberikan tantangan tersendiri bagi kawasan tersebut. Pada penelitian ini juga penulis menyimpulkan bahwa

ASEAN harus mengambil sikap yang tegas dalam menyikapi rivalitas antara Tiongkok dan AS.

Penelitian **keempat** yakni oleh Deasifa Aqramina dan Anggun Puspitasari yang berjudul Strategi Perimbangan Amerika Serikat di Asia Pasifik terhadap Tiongkok melalui Kebijakan Ekonomi Pada Periode 2017 – 2019. Perbedaan penelitian ini dan yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada objek yang diteliti, yang dimana penelitian oleh Deasifa dan Anggun berfokus pada strategi perimbangan AS terhadap Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik, sedangkan penulis mengambil objek penelitian yaitu negara Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan yang dikeluarkan pada masa Presiden Donald J. Trump yaitu *America First toward Indo-Pacific*, yang dianggap sebagai strategi AS di kawasan Asia-Pasifik dengan berfokus dalam *new security architecture* dan *economic strengthening*. Kebijakan ini ditujukan untuk menghadapi kebijakan milik Tiongkok yaitu proyek BRI, yang dimana Tiongkok dianggap akan menggantikan posisi AS di Asia Pasifik. Dengan melalui strategi ini, AS berupaya untuk mengembalikan hegemoninya di kawasan Asia-Pasifik yang membuat hubungan negara tersebut dengan Tiongkok saling melawan ataupun menghadapi rivalitas yang ada. Bagi kawasan Asia-Pasifik sendiri kedua negara memiliki arti yang penting bagi kawasan ini dikarenakan dalam sektor keamanan AS telah dianggap sebagai mitra keamanan sedangkan Tiongkok sebagai mitra perekonomian. Adapun penelitian ini

menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh AS berakhir dengan *zero sum game*.

Penelitian **kelima** yaitu ditulis oleh Vanilla Planifolia dengan judul strategi *rebalancing* Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik yang dimana penelitian tersebut berfokus terhadap Tiongkok dianggap sebagai ancaman baru sehingga AS melakukan upaya *balancing* di kawasan Asia-Pasifik. Perbedaan penelitian ini dengan milik penulis yaitu fokus dari penelitian ini terhadap suatu kawasan yaitu Asia-Pasifik dan tidak memfokuskan ke satu negara saja, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus kepada satu negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia. Selain itu, penelitian ini berfokus terhadap strategi militer yang dilakukan oleh AS. Menurut jurnal ini, Tiongkok secara khusus menjadi tantangan bagi AS dikarenakan kekuatan yang dimiliki oleh Tiongkok semakin meningkat tiap tahunnya sehingga berpotensi untuk unggul di kawasan Asia-Pasifik. AS yang menganggap hal tersebut sebagai ancaman melakukan upaya untuk mengembalikan posisinya dan menekan perkembangan Tiongkok dengan melalui kebijakan *Pivot to Asia*.

Penguatan aliansi militer yang dilakukan oleh AS menjadi strategi dengan tujuan untuk memperkecil ruang gerak Tiongkok yang berupaya untuk mendominasi di kawasan Asia-Pasifik. Strategi tersebut merupakan salah satu penggunaan *balancing* yang akan memberikan keuntungan bagi AS dikarenakan dapat mempertahankan posisinya sebagai negara yang memiliki pengaruh yang besar di antara negara-negara aliansinya terutama

yang berada di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian ini akan digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti yaitu strategi yang dilakukan oleh AS dalam mengimbangi investasi yang dilakukan oleh Tiongkok di Indonesia.

Kelima penelitian tersebut akan digunakan sebagai referensi dan acuan dalam penelitian ini yang dimana penulis mengambil beberapa topik penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu mengenai respon G7 terhadap kehadiran Tiongkok di Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini akan berfokus kepada respon negara-negara G7 terhadap kehadiran Tiongkok dalam sektor perekonomian Indonesia. Bentuk dari respon tersebut akan dijelaskan dengan melalui dijalankannya program *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) yang dibentuk oleh G7 yang diinisiasi oleh AS untuk merespon kehadiran Tiongkok yang terus meluas di sektor ekonomi. Melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok terus menjalankan kebijakan ekonominya di negara-negara berkembang salah satunya di Indonesia. Dengan berfokus pada investasi dan bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Tiongkok di beberapa sektor yang ada di Indonesia. Penulis juga akan menjabarkan peningkatan investasi asing yang dilakukan oleh kedua negara di Indonesia dengan batasan tahun 2019 hingga 2023. Tentunya, akan terdapat perbedaan yang dilakukan oleh penulis dan penelitian-penelitian terdahulu agar mendapatkan aspek baru yang diteliti.